



Kehormatan Tidak Perlu Dikejar, Diburu, Apalagi Diperebutkan Oleh Penyelenggara Pemilu

Didik Supriyanto, S.IP, M.IP resmi menjadi Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mulai Rabu (15/4/2020). Didik mengucapkan sumpah jabatan menjadi satu dari tujuh “pendekar” penegak kode etik pemilu.



Akankah kehadiran Didik di DKPP memberi lebih banyak warna dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu?

Berikut petikan wawancara dengan Didik Supriyanto sesaat setelah pengucapan sumpah:

Selamat Pak Didik telah resmi menjadi Anggota DKPP, apa yang Anda rasakan usai pengucapan sumpah?

Saya harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa mendapat penugasan ini. Karena ini yang menugaskan presiden, Insya Allah saya akan bekerja sebaik-baiknya agar memenuhi harapan presiden. Semoga kehadiran saya (di DKPP) bermanfaat untuk seluruh stakeholder mulai dari pemilih, calon peserta, parpol peserta pemilu dan penyelenggara pada umumnya.

Pak Didik sudah lama menggeluti kepemiluan dan akhirnya berlabuh di DKPP, perlu adaptasi lagi atau langsung 'berlari' bekerja?

Tanpa dukungan kolega, Prof. Muhammad dan anggota yang lain serta Sekretariat enggak mungkin bekerja dengan maksimal. Dari lubuk hati paling dalam mohon *support* dari Pak Ses (Sekretaris DKPP Bernad Dermawan Sutrisno, red) dan jajarannya sehingga saya bisa bekerja maksimal. Taraf awal akan banyak saya ganggu Pak Ses dan kawan-kawan, mudah-mudahan tidak lama satu bulan saja, langsung *tune in*.

Apa hal pertama yang akan dilakukan setelah menjadi Anggota DKPP?

Standar saja, pekerjaan tugas dan wewenang sebagai Anggota DKPP yang harus bekerja kolegial sudah dijabarkan undang-undang. Sejauh saya bekerja sesuai undang-undang sudah bagus. Tidak punya angan-angan bahwa DKPP harus begini dan begitu, ikuti saja yang diperintahkan undang-undang.

DKPP dipandang 'menakutkan' oleh penyelenggara pemilu, pendapat Bapak?

Dari kepentingan saya sebagai anggota baru yaitu tidak ingin lembaga ini menjadi 'momoknya' penyelenggara pemilu. Saya tegaskan DKPP tidak memposisikan diri menakutkan Bawaslu atau KPU, kalau itu dilakukan sudah melampaui kewenangan. Kita bekerja sesuai koridor saja. Ini lembaga etik yang bekerja lebih banyak menunggu (ada pengaduan). Kalau penyelenggara sudah baik, kerja DKPP sedikit, kalau kurang baik atau punya niat buruk DKPP banyak kerjaan.



Menurut bapak, konsep kehormatan bagi seorang penyelenggara pemilu seperti apa?

Kehormatan itu tidak perlu dikejar, diburu, apalagi diperebutkan. Hanya dengan melaksanakan pekerjaan dengan mandiri, menjaga integritas dan kredibilitas maka kehormatan ini akan sendirinya diterima. Justru dengan cara sederhana itu penyelenggara bisa mendapatkan kehormatan, tidak harus melibatkan pihak lain maupun lembaga ini. DKPP bertugas menjaga kehormatan tersebut.

DKPP memutus banyak perkara pelanggaran kode etik. Sudahkah penyelenggara pemilu belajar dari putusan-putusan DKPP?

Apa yang diputuskan DKPP selama ini menjadi perhatian penyelenggara pemilu, sehingga mulai memahami mana yang boleh dan tidak. Mereka juga harus belajar dari banyaknya kasus pelanggaran kode etik. Maka ke depan perilaku buruk penyelenggara pemilu berkurang dan menurun.